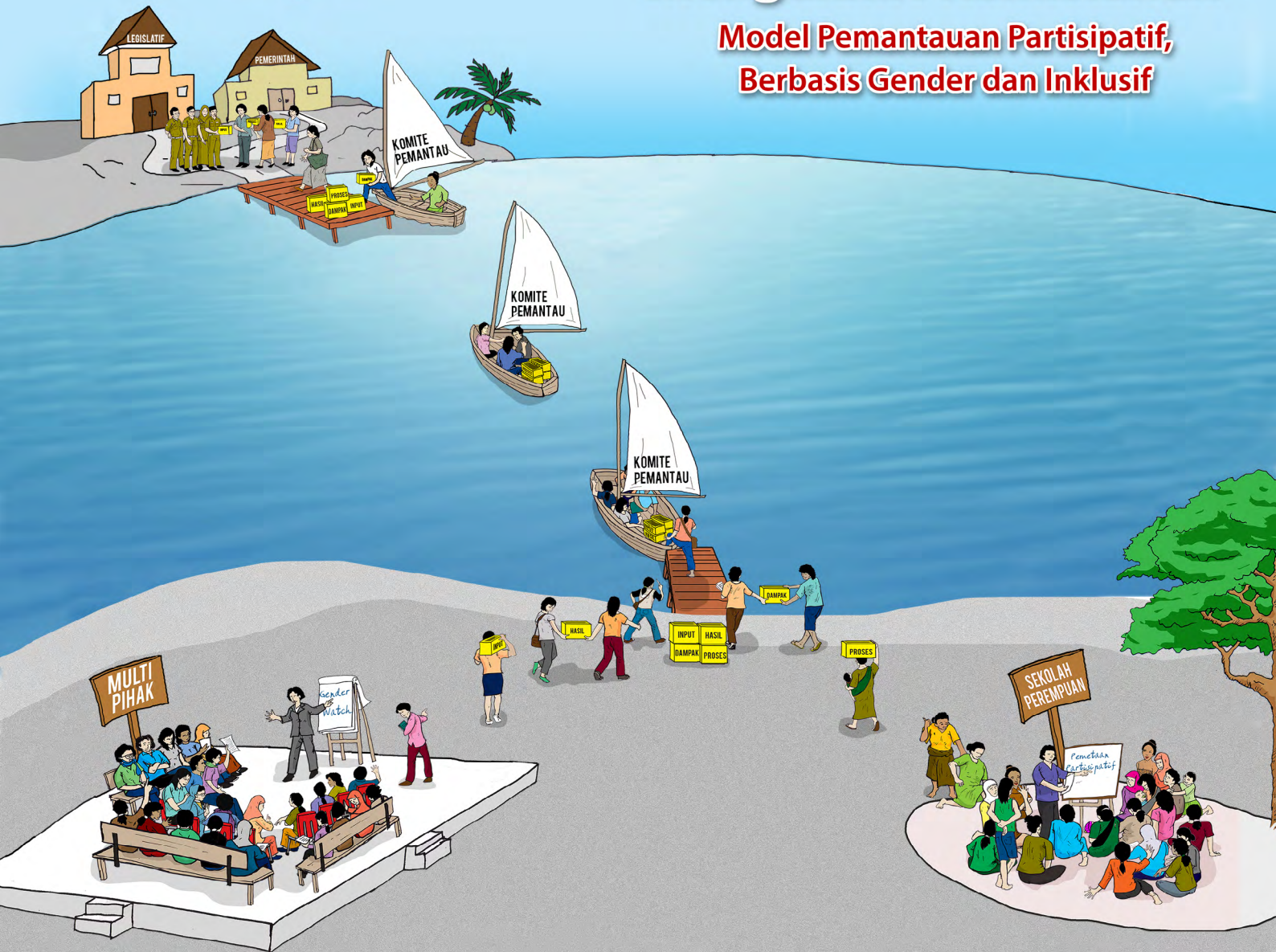


Gerakan *Gender Watch* Mengakhiri Kemiskinan

Model Pemantauan Partisipatif,
Berbasis Gender dan Inklusif



Kerjasama

**Institut KAPAL Perempuan, YKPM, LPSDM, YAO,
KPS2K, PBT dan MAMPU - DFAT AusAid**

Sekretariat Bersama: Jl. Kalibata Timur Raya No. 5 RT 03/10, Pancoran Jakarta Selatan. Telp. 021-7988875, Fax 021-79187971

@ office@kapalperempuan.org 🏠 www.kapalperempuan.org 📘 INSTITUT KAPAL Perempuan 🐦 @KAPAL_Perempuan

Gender Watch

Model Pemantauan Partisipatif, Berbasis Gender dan Inklusif Untuk Penghapusan Kemiskinan melalui Perlindungan Sosial



1 Apa yang dimaksud dengan Gender Watch?

Gender Watch merupakan salah satu model pemantauan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui gerakan bersama dengan melibatkan tiga pelaku pemantauan yaitu (1) kelompok perempuan miskin sebagai penerima manfaat program, (2) pemerintah dan (3) masyarakat sipil (pers, akademisi, perwakilan organisasi kemasyarakatan). Program penanggulangan Kemiskinan yang dipantau adalah program perlindungan sosial bidang kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI). Ada empat aspek yang dipantau dalam program ini akan yaitu aspek input, proses, output dan hasil.

2 Apa yang dihasilkan dari Gender Watch ini?

- Data desa tentang “Feminisasi Kemiskinan” yang menunjukkan situasi kemiskinan perempuan disertai dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan dengan perspektif gender dan inklusif. Misalnya, data tentang kematian ibu melahirkan, perempuan putus sekolah, buta huruf, lapangan kerja dan tingkat upah perempuan, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, kekerasan terhadap perempuan, dll.
- Data hasil evaluasi yang mencakup 4 aspek yaitu: (1) **input** mencakup kebijakan, penganggaran, kelembagaan, mekanisme

kerja); (2) **proses** mencakup penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi dalam pelaksanaan program; (3) **hasil** yaitu menilai tingkat realisasi program dan capaian hasil program yang disandingkan dengan perencanaan; (4) **dampak** yang terkait dengan proses-proses pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dan kelompok marginal.

- Berkembangnya Sekolah Perempuan sebagai model “pendidikan komunitas” yang merupakan wadah belajar untuk meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dari kalangan miskin agar mampu keluar dari kemiskinan.



- Terbentuknya kelompok-kelompok pendukung dari multipihak yang mempunyai komitmen bersama untuk upaya penghentian kemiskinan melalui Komite Pemantau dan Forum Mutipihak.

3 Apa manfaatnya?

- Mempertajam data pemerintah desa dan kabupaten yang sifatnya kuantitatif. Data ini merupakan data kualitatif sehingga dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai situasi di lapangan dibalik-angka-angka statistik.

- Menjadi basis data dalam perencanaan pembangunan desa dan kabupaten sehingga data ini penting untuk digunakan dalam Musrenbang dari tingkat desa sampai kabupaten.
- Menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan dan anggaran yang pro rakyat miskin, responsif gender dan kelompok marginal.
- Membangun kesadaran akan pentingnya melakukan pemantauan bersama terhadap program-program perlindungan sosial yang ada yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan, anggaran, dan proses program itu sendiri.
- Mengetahui ada tidaknya kesenjangan atau perbedaan antara rencana dengan realisasi program perlindungan sosial dengan menggunakan perspektif keadilan gender, inklusif dan transformatif.



4 Apa kelebihannya?

- **Penerapan prinsip partisipatif.** Pemantauan ini melibatkan partisipasi masyarakat dari semua kalangan, mulai dari perempuan miskin sasaran program, NGO, Ormas, akademisi, jurnalis, dan masyarakat umum.
- **Penerapan pengarusutamaan gender (PUG).** Perempuan sebagai pelaku utama dalam pemantauan dan juga menjadi pelaku untuk membawa hasil-hasilnya dalam proses pengambilan keputusan di komunitas maupun dalam Musrenbang.
- **Tepat sasaran.** Sebagai sebuah model yang berbasis komunitas, dilakukan langsung oleh komunitas dan didukung pemerintah setempat, maka pemantauan ini dapat menjangkau kelompok-kelompok marginal, wilayah terpencil, terdalam dan terluar.
- **Murah.** Pemantauan yang menghasilkan data dasar dan capaian program ini tidak membutuhkan tenaga kerja dan konsultan

karena dilakukan secara sukarela dan hanya membutuhkan biaya operasional.

- **Valid.** Pengumpulan data partisipatif dilakukan oleh penduduk setempat, informannya juga dari penduduk setempat dan kemudian dilakukan proses validasi data pada forum uji publik di tingkat desa dan kabupaten.
- **Terintegrasi dengan pendidikan di Komunitas.** Proses pemantauan ini sekaligus memperkuat kapasitas perempuan miskin dalam meningkatkan kesadaran kritis, kemampuan pemantauan, *life skill* sehingga menguat partisipasi dan kepemimpinannya di ranah privat dan publik.

5 Mengapa Gender Watch ini Diperlukan?

Masih tingginya feminisasi kemiskinan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari akutnya masalah-masalah perempuan misalnya angka kematian ibu melahirkan yang ditargetkan dalam MDGs pada tahun 2015 sebesar 102, namun pada tahun 2012 justru meningkat tiga kali lipatnya yaitu 359, perkawinan dibawah umur menduduki lebih dari 43%, penduduk yang tidak sekolah mencapai 27,97 % dan perempuan merupakan kelompok yang lebih pendek dalam mengenyam pendidikan, perempuan kepala keluarga, dll.



Masalah-masalah lainnya adalah program tidak tepat sasaran, yang akar masalahnya adalah sistem pendataan dan pengawasannya. Disisi lain juga ada masalah lemahnya posisi masyarakat sipil dalam melakukan fungsi kontrol, lemahnya posisi perempuan miskin dan kelompok marginal sebagai kelompok sasaran yang selama ini hanya ditempatkan sebagai kelompok pasif untuk sekedar menerima program.

6

Bagaimana *Gender Watch* Diterapkan?

- **Membangun metodologi.** Tahapan ini dilakukan dengan mengacu pada pemetaan wilayah program, mempelajari literatur dan konsultasi kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi serupa.
- **Penguatan kapasitas.** Dilakukan dengan cara membangun pendidikan di komunitas melalui Sekolah Perempuan agar memiliki kemampuan dalam melakukan pengumpulan data pemantauan dan kemampuan melakukan advokasi dengan perspektif gender dan inklusif.
- **Kelompok pendukung.** Membentuk dan melakukan peningkatan kapasitas kelompok pendukung yang terdiri dari unsur masyarakat umum, pemimpin-pemimpin lokal, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Non Pemerintah, Pemerintah, Jurnalis dan Akademisi. Mereka diwadahi dengan beberapa jaringan yaitu Tim Pemantau Komunitas tingkat desa, Tim Pemantau Komunitas tingkat kabupaten dan Forum Multipihak di tingkat kabupaten dan desa.



- **Pelaksanaan Evaluasi.** Evaluasi dilakukan oleh Komite Pemantau yaitu gabungan dari Tim Pemantau Komunitas dan Tim Pemantau Kabupaten. Laporan hasil evaluasi ini disosialisasikan kepada masyarakat luas. Selain itu juga diajukan kepada pemerintah untuk perencanaan pembangunan dan perbaikan kebijakan yang pro rakyat miskin dan responsif gender.

7

Bagaimana Menggunakan Hasil Pemantauan untuk Penghapusan Kemiskinan Perempuan?

Pemerintah dapat menggunakan hasil pemantauan ini untuk memperbaiki kebijakan, program, dan prosedur-prosedur program agar berpihak pada orang miskin, marginal, minoritas dan responsif gender.

Masyarakat miskin terutama kelompok-kelompok perempuan penerima manfaat program dapat menggunakan hasil pemantauan ini sebagai alat bukti untuk memastikan program-program kemiskinan dapat berdampak pada penurunan kemiskinan, terutama kemiskinan perempuan.

Komite Pemantau: dapat melakukan beberapa kegiatan advokasi berbasis data yaitu (a) menyebarkan melalui dialog dan kampanye publik; (b) melakukan audiensi/dialog dengan Pemerintah; (c) mendesakkan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); (d) melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk perubahan kebijakan dan penganggaran dan (e) membangun Pusat-Pusat Pengembangan *Gender Watch* di Komunitas.

Metodologi yang dikembangkan dalam *Gender Watch* ini menggunakan Audit Sosial sebagai referensi. Namun demikian, Audit Sosial ini merupakan model audit yang masih bersifat umum, oleh karena itu tahun 2010 Institut KAPAL Perempuan mengembangkan model audit sosial dengan menggunakan perspektif keadilan gender dan inklusif yang didukung oleh The Ford Foundation. Alat atau instrument yang dibangun adalah Audit Gender Berbasis Komunitas (AGBK). Pada tahun 2013, model diterapkan bersama di 6 provinsi di kabupaten/kota Lombok Timur, Lombok Utara, Pangkajene Kepulauan, Kupang, Gresik, Padang dan DKI Jakarta, bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Mitra (LPSPDM-Nusa Tenggara Timur), Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM-Sulawesi Selatan), Yayasan Alfa Omega (YAO-Nusa Tenggara Timur), Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K-Jawa Timur), Pambangkik Batang Tarandam (PBT-Sumatera Barat).

Jakarta, 8 Maret 2016